

PENGARUH SISTEM AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Randi Apri Doni

randi.apridoni1625@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Juita Sukraini

jjitasukraini@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Siska Yulia Defitri

siskayd023@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Afni Yeni

yeniafni92@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Esi Sriyanti

srivantiesi01@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Nurhayati

nurhayatie383@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Info Jurnal

Sejarah Artikel:

Diterima

02 – 02 – 2023

Disetujui

26 – 05 – 2023

Dipublikasikan

27 – 08 - 2023

Keywords:

Local Government

Accounting Systems;

Internal Control

Systems and Reporting

Systems, Performance

Accountability of Local

Government Agencies

Klasifikasi JEL:

H80; H82; H83

Abstract

Accountability is believed to be able to change the condition of a government that is unable to provide good and corrupt public services towards a democratic government structure, the implementation of an accountable government that will get support from the public on the part of the accountability organizer reflects the government's commitment to serving the public. The strengthening of public demands for the implementation of public accountability by government organizations, both central and local governments, has led to all government agencies compiling strategic planning, measuring performance and reporting it.

The purpose of this study was to determine: (1) the effect of the local government accounting system on the performance accountability of government agencies; (2) Influence of Internal Control System on Performance Accountability of Government Agencies; (3) Reporting System on Performance Accountability of Government Agencies.

This research was conducted at the Solok Regency Local Government Organization. The population in this study were 26 Local Government Organizations within the Solok Regency Government. The sampling technique in this research is total sampling. This study uses Multiple Linear Regression Analysis.

The results of this study indicate that: (1) the Regional Government Accounting System has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies; (2) The Internal Control System has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies; (3) The Reporting System has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies.

I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju sesuatu tatanan pemerintah yang demokratis penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapatkan dukungan dari publik dipihak penyelenggara akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkanya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah di berikan dan dikuasai untuk mencapai sasaran dan tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik (Afrina 2015). Menurut (Pratama, Agustin, dan Taqwa 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat di maknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan menggunakan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Rasdianto 2013) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebuah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebuah proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi Ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan (Halim dan Kusufi 2012)

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2017). Menurut (IAPI 2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam kendalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Krisniaji 2010) Rencana organisasi dan metode yang di gunakan untuk menjaga atau melindungi aktivitas dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat di percaya. Menurut (Rija dan Rubino 2018) bahwa internal control adalah sebuah alat penting untuk mencapai tujuan bisnis (beroperasi secara konstan dalam hal efisiensi dan efektifitas), dan pada saat yang sama untuk menghindari pemborosan sumber daya, untuk melindungi aset perusahaan, produksi informasi akuntansi dan manajemen yang andal.

Menurut (Hidayatullah 2013) Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut (Pratama, Agustin, dan Taqwa 2019)

Fenomena didalam penelitian ini yaitu Pemerintahan Kabupaten Solok telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hasil dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP yang telah di lakukan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) pada pemerintahan Kabupaten Solok selama tiga tahun terakhir memperoleh predikat B.

Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengetahui secara bersama- sama Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

II. TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory

Stewardship Theory adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward (pemerintah) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal (rakyat).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyediaan penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya (Lukito 2014). Sedangkan menurut (Halim 2012) Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah di berikan dan dikuasai untuk mencapai sasaran dan tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik (Afrina 2015)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebuah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD (Rasdianto 2013). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebuah proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi Ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan (Halim dan Kusufi 2012)

Sistem Pengendalian Internal

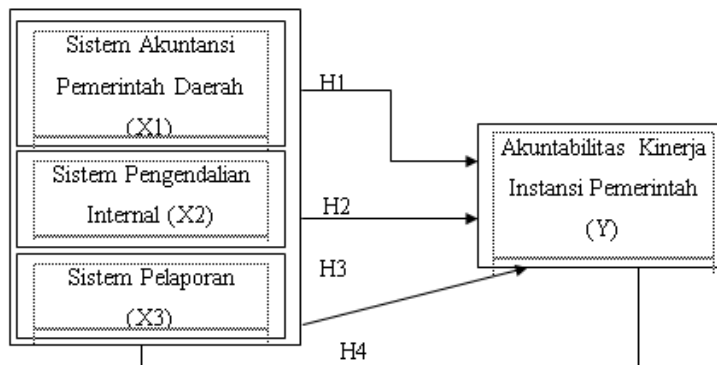
Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2017). Rencana organisasi dan metode yang di gunakan untuk menjaga atau melindungi aktivitas dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat di percaya (Krismiaji 2010). Sistem Pengendalian Internal adalah sebuah kewajiban dari pihak manajemen yang sangat penting (Hall 2011)

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran) (Hidayatullah 2013) Sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut (Pratama, Agustin, dan Taqwa 2019).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang ingin di teliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan literatur maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H1. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- H2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- H3. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- H4. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian dan Sistem Pelaporan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer. Sedangkan sumber data berasal dari hasil yang di peroleh dari pengisian kuesioner yang telah di berikan ke setiap Organisasi Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok. Teknik pengumpulan data adalah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala OPD, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan dan Pengelola Keuangan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok kuesioner atau angket. Populasi dalam penelitian ini 26 Organisasi Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok. Teknik pengambilan sampel adalah *Total Sampling*. Pengolahan dalam penelitian ini menggunakan program SPPS 23 *for windows*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah didapatkan nilai thitung = 5,210 > ttabel = 1,664 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah daerah (X1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Artinya, jika penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada nilai kinerja daerah yang dituangkan dalam nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Hal ini disebabkan karena tujuan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yang

laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kerjanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afrina 2015; Zulharman 2015) pada SKPD Kota Pekanbaru, (Riani 2015) di SKPD Kabupaten Agam, dan penelitian yang dilakukan oleh (Aprianti 2017) di SKPD Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk sistem pengendalian internal mempunyai nilai $t_{hitung} = 3,467 > t_{tabel} = 1,664$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal secara signifikan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya, dengan adanya Sistem Pengendalian Internal didalam suatu pemerintahan, maka akan mempermudah pelaksanaan terhadap evaluasi dan tindak lanjut dari proses kegiatan yang ada khususnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini dikarenakan Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan bukanlah maksud untuk menghilangkan semua kemungkinan kesalahan atau penyimpangan, akan tetapi Sistem Pengendalian Internal yang efektif akan menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Kahar, Fitriwati, dan Iqbal A 2017) pada SKPD Kabupaten Parigi Moutong, (Kadek et al. 2014) di SKPD Kabupaten Klungkung dan penelitian oleh (Fitriana, Hidayati, dan Mawardi 2018) Dinas Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk sistem pelaporan mempunyai nilai $t_{hitung} = 2,967 > t_{tabel} = 1,664$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,004 > 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem pelaporan secara signifikan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya, dengan adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok.

Hal itu disebabkan karena dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Fauzan 2017) pada SKPD 50 Kota Provinsi Sumatera Barat, (Fathia 2017) SKPD Provinsi Riau dan (Riani 2015) SKPD Kabupaten Agam.

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil uji F diperoleh nilai $F_{hitung} 127,681 > 2,72$ atau nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2) dan Sistem Pelaporan (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian dan diterima. Hal ini Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2) dan Sistem Pelaporan (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan faktor atau unsur didalam keberhasilan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan adanya penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan maka akan memudahkan didalam membuat laporan yang dituangkan dalam nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

V. KETERBATASAN DAN PENELITIAN MASA DEPAN

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan Bagi pemerintah Kabupaten Solok agar meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pemerintahan daerah juga harus

meningkatkan lagi didalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan supaya pemerintahan Kabupaten Solok lebih baik lagi kedepannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas ruang lingkup penelitian dan penambahan responden yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini.

VI. SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Solok, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari peneliti sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Solok. Artinya, jika penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada nilai kinerja daerah yang dituangkan dalam nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok. Artinya, dengan adanya Sistem Pengendalian Internal didalam suatu pemerintahan, maka akan mempermudah pelaksanaan terhadap evaluasi dan tindak lanjut dari proses kegiatan yang ada khususnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya, dengan adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok. Hal itu disebabkan karena dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran.
4. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Dina. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." (*Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru*). *Jom FEKON Universitas Riau*. Vol 2(No 2).
- Aprianti, Risma. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. (Survei pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat)." : 1–17.
- Fathia, Nurul. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)." (*Study Kasus SKPD di Provinsi Riau*) 4(1): 670–85.
- Fauzan, Reyhan Hady. 2017. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)." (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat*) *Universitas Riau* Vol. 4(No. 1).
- Fitriana, Riska Dwi, Nur Hidayati, dan Muhammad Cholid Mawardi. 2018. "Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*

Vol 7(No 2).

- Halim, Abdul. 2012. Jakarta: Salemba Empat *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. 2012. "Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi." Jakarta: *Salemba Empat*.
- Hall, James. 2011. *Accounting Information System*. Edisi Satu, Salemba Empat.
- Hidayatullah, A. 2013. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*.
- IAPI. 2011. *Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)*. Edisi Mei 2009. Penerbit ikatan Akuntan public Indonesia, Jakarta.
- Kadek, Ni, Rina Primayoni, I Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana. 2014. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." (*Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung*) *Jurnal Online Universitas Pendidikan Ganesha* Vol 2(No 1).
- Kahar, Abdul, Fitriwati, dan Muh Iqbal A. 2017. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." (*Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Parigi Moutong*) Vol 5(No 12): 177–84.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia) Jakarta.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Cetakan Keempat. Jakarta. Salemba Empat.
- Pratama, Rio, Henri Agustin, dan Salma Taqwa. 2019. "Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah." 1(1): 429–44.
- Rasdianto, Erlina. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan.
- Riani, Isty. 2015. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Online Universitas Riau* 2(2).
- Rija, Maurizio, dan Franco Ernesto Rubino. 2018. "The Internal Control Systems Integrated into the Various Profiles of Governance , Audit , Risk and Compliance." 13(5): 21–36.
- Zulharman, Khodri. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." (*Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru*) *Jom FEKON Universitas Riau* Vol 2(No 2).